

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aditya, Umi Rozah, Filsafat Pemidanaan Dalam Sistem Pemidanaan KUHP 2023 (Aplikasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana), (Semarang: Yoga Pratama, 2023).

Aisyah Humaida & Nixon Randy Sinaga, Modul Pelatihan Untuk Pendampingan Orang Yang Berhadapan Dengan Hukuman Mati, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2021).

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2021).

Arief, Barda Nawawi, Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor, (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

_____, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009).

Ashshiddiqie, Jimly, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia. Dalam Buku; Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta, Cetakan pertama: 2012).

Bernard, et.al, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

Franek, Hans Goran, Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati, (Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia, Rauol Wallenberg Institute, 2003).

Friedman, Lawrence M, The legal System a Social Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Juli 2013).

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

Lombrosso, Crime Its Causes And Remedies, Diterjemahkan Oleh Henry P.Horton, Patterson Smith, (New Jersey: Colombiala, 1968).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta, 2009).

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: iLiberty, 2008).

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT Alumni, 2005).

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985).

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980).

Salah, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).

Setiady, Tolib, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Soekanto, Soerjono, et.al, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Sudarto, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, (BPHN, 1982).

Sugiyono, Metode Penelitin Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008, cet IV).

Waluyo, Bambang, Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan pertama, 2016).

Winartha, I Made, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006).

Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

2. Artikel Ilmiah

Anugrah, R., & Desril, R, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.1, 91.

Arief, A, “Problematisa Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”, *Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 1, 97.

Arista Candra Irawati, “Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)”, *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 1, No. 2, (2019), 3.

Dzikriyyan, “Pidana Mati Dengan Masa Percobaan (Studi Komparasi Pada Teori Hukum)”, *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2025).

Elsa Priskila Singal, dkk, “Primum Remedium dalam Hukum Pidana Sebagai Penanggulangan Kejahatan Keras Putih (Money Laundering)”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 6, (Mei 2021), 204.

Endang Pratiwi, *et.al*, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, (2022), 274.

Farhan Muntafa, Ade Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru dihubungkan dengan asas kepastian Hukum”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.4, No. 2, (2023), 136.

Fauziah Rasad, “Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No 1, (2021), 155.

Garry Fischer Simanjuntak, ”Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan teori Utilitarianisme di Indonesia”, *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No.1, (2023), 473.

Kuspitasari, I., & Purwoto, U. R. “Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017), 6.

Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2021), 219.

Nur Ainiyah Rahmawati, ”Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium”, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 1, No.2, 41.

Nurdiansah, M. A, “Penerapan Kebijakan Komutasi Pidana Mati Pada RKUHP Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No.1, (2023), 23-24.

Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korups. Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011”, Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 10, No. 3 (Desember, 2017), 267.

Rambe, R. F. A., Al Khoir, A., & Marpaung, H. S, “Pidana Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia”, *Journal on Education*, Vol. 6, No. 2, (2024), 14016.

Rauf, Fadel, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh”, *S1 thesis, Ilmu Hukum*, (2021).

Rudi Efendy Siregar, “Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati”, *Locus Journal of Academic Literature review*, Vol. 1, No. 7, (2022), 378.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-32.Pk.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Dewan Eropa, *Protocol 13 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms on the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances*, 3 Mei 2002

Organisasi Negara-Negara Benua Amerika (*Organization of American States/OAS*), Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty ("*Pact of San Jose*"), 8 Juni 1990

Dewan Eropa (*Council of Europe*), *Protocol 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of Death Penalty*, 28 April 1983

4. Website/Internet

ADY, 2016, *Penilaian Hukuman Mati dan Penolakan Grasi Harus Jelas*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penilaian-hukuman-mati-dan-penolakan-grasi-harus-jelas-lt57fb656131ce3/>, diakses pada 30 Oktober 2024.

ADY, 2016, *Penilaian Hukuman Mati dan Penolakan Grasi Harus Jelas*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penilaian-hukuman-mati-dan-penolakan-grasi-harus-jelas-lt57fb656131ce3/> diakses pada 30 Januari 2025.

ANT, *PK Kedua terpidana Kasus Bali Nine Kandas*,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d233ff6ffe0/pk-kedua-terpidanakasus-bali-nine-kandas>, diakses pada 29 Januari 2025.

BBC, 2015, *Bali Nine ringleaders Andrew Chan and Myuran Sukumaran*

<https://www.bbc.com/news/world-asia-30997099> diakses pada 30 Januari 2025.

Estomihi FP Simatupang, *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman*,

2020, *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman - Beranda Hukum*, diakses pada 11 Oktober 2024

Institute for Criminal Justice Reform, 2018, *ICJR Tunggu Bukti Komitmen*

pemerintah Soal Indonesian Way Pidana Mati, <https://icjr.or.id/icjr-tunggu-bukti-komitmen-pemerintah-soal-indonesian-way-pidana-mati/>, diakses pada 2 Februari 2025

Institute for Criminal Justice Reform, *ICJR Sepakat dengan Pemerintah:*

Pengundangan KUHP Baru Wajib Menunda Eksekusi Pidana Mati Saat ini,
ICJR Sepakat dengan Pemerintah: Pengundangan KUHP Baru Wajib
Menunda Eksekusi Pidana Mati Saat Ini | ICJR, diakses pada 1 Februari 2025.

Mahkamah Agung, (2019), Wakil Ketua Mahkamah Agung Bagian Yudisial :
Hukuman Mati Adalah Alternatif Bukan Pidana Pokok,
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3916/wakil-ketua-mahkamah-agung-bidang-yudisial-hukuman-mati-adalah-alternatif>,
diakses pada 3 Februari 2025

Susana Rinta Kumalasanti, “Wamenkumham: Ada Aturan Baru soal Pidana Mati, Eksekusi Harus Ditunda”, Kompas.com (28 Februari 2023),
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/28/wamenkumham-adaaturan-baru-soal-pidana-mati-eksekusi-harus-ditunda>, diakses pada 1 Februari 2025

Susana Rita Kumalasari, (2022), *Pidana Mati ala Indonesia, Jalan Tengah Kaum Abolisionis dan Retensionis*
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/26/pidana-mati-ala-indonesia-jalan-tengah-kaum-abolisionis-dan-retensionis> diakses pada 2 Januari 2025

Yohanie Linggasari, 2015, *Komnas perempuan Sebut Mary Jane Korban Trafficking*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150424171827-12-49061/komnas-perempuan-sebut-mary-jane-korban-kdrt-dan-trafficking>, diakses pada 2 Februari 2025.

5. Lainnya

Aisyah Humaida & Nixon Randy Sinaga, Modul Pelatihan Untuk Pendampingan Orang Yang Berhadapan Dengan Hukuman Mati, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2021).

Amnesty International, Laporan Global Amnesty International: Hukuman Mati dan Eksekusi 2023, (London: Amnesty International 2024, 2023).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Budiman, A. A., & Rahmawati, M, Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020).

Eddyono, et al. Hukuman Mati dalam RKUHP: Jalan Tengah yang Meragukan, (Institute for Criminal Justice Reform, 2015).

ICJR, Monograf Focus Group Discussion Hukuman Mati Dalam RKUHP 2015, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015).

Institute for Criminal Justice Reform, Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia, (Jakarta: ICJR, 2020).

Komnas, H. A. M. Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komunitas Hukuman Mati, (Komnas HAM, 2020).

Tim ICJR, Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).